

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman. 1987. *Beberapa pemikiran tentang otonomi daerah*. Media sarana pers. Jakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2009. *Pendanaan Pemerintah Daerah*. Kampus Unhas Tamalanrea. Makassar
- Afandy, Mohammad 2013. *Strategi dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara*.
- Amir, Taufiq. 2012. *Manajemen Strategik: Konsep dan Aplikasi*. Rajawali Pers. Jakarta
- Bawazier, Fuad. 1998. *Dampak pungutan terhadap dunia usaha, dampak terhadap ekonomi biaya tinggi*. CSIS. Jakarta
- Comeford, callagan. 1985. *Strategic Management (text, tools, and cases for business policy)*. Library of congress cataloging in publication data. United States of Amerika
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan keuangan Daerah*. PT Indeks. DKI Jakarta
- Dr. Fuadi. 2016. *Zakat dalam sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Deepublish. Yogyakarta
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Stegisi ( Teori dan Aplikasi)*. Alvabeta cv. Bandung
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan pengendalian keuangan daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan daerah*. UPP-AMP YPKN. Yogyakarta
- Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba empat. Jakarta



- Halim, Abdul dan Theresia Woro Darmayanti. 2007. *Pengelolaan keuangan daerah*. Edisi kedua. Yogyakarta
- Hasibuan Albert, Sutarno. 1995. *Otonomi daerah peluang dan tantangan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Hitt,dkk. 2005. *Strategic management ( Competitiveness and globalization: Concepts and Cases)*. Library of Congress Control. United States of America
- Heene Aime, dkk. 2010. *Manajemen strategic keorganisasian publik*. PT Refika Aditama. Bandung
- Hoessin, B, Maksum R.I, Riduansyah, M dan Hanafi, Puji Nur. 2005. *Naskah akademik tata hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah*. PKPAD dan Kota, Fisip UI. Jakarta
- Kustiawan, Memen. 2005. *Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah*. Jurnal ilmu administrasi vol 2 no. 1
- Machfud, Sidik. 2002. *Optimalisasi pajak daerah dalam rangka meningkatkan keuangan daerah*. STIA LAN. Bandung
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan pembangunan daerah*. Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis data kualitatif*. UI Press. Jakarta
- Mintzberg, dkk. 1995. *The Strategy Process*. Prentice-Hall International Inc. London
- Moleong Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho dan Ricky.2006. *BUMN Indonesia : Isu Kebijakan, Strategi*. Jakarta : Alex Media Komputindo
- Nurhayati Neni. 2015. *Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan kontribusi daerah erhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan dimoderasi pelaksanaan Good Governance pada kabupaten/wilayah III Cirebon*. Universitas Kuningan.



- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Rahmi, Ade. 2013. *Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah*. Universitas Negeri Padang
- Rangkuti. 2006. *Teknik membedah kasus bisnis analisis SWOT*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Rochmat, Soemitro. 1990. *Dasar-dasar Hukum pajak dan pajak pendapatan*. Eresco. Bandung
- Rozali, Abdullah. 2000. *Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Strategi*. Refika Aditama. Bandung
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Siagian, Sondang P. 1995. *Analisis serta perumusan kebijaksanaan dan strategi organisasi*. PT Toko Gunung Agung. Jakarta
- Sidik. Machfud. 2002. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah*.
- Silalahi, Uber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama. Bandung
- Sjafrisal. 2014. *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. PT Rajagrafindo Persada. Kota Depok
- Soesastro. 2007. *Pajak dan retribusi daerah (pengelolaan pemerintah daerah dalam aspek keuangan, pajak, dan retribusi daerah)*. Jakarta : Grafindo
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Suparmo, Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Andi. Jakarta
- Suroso, Imam. 2007. *Konsep dan Teori Manajemen Strategi*. Center for Society Studies. Jember.



- Taufiqurokhman. 2016. *Manajemen Strategik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr.Moestopo Beragama. Jakarta Pusat
- Usmara. A. 2003. *Implementasi Manajemen Stratejik : Kebijakan dan Proses*. Amara Books. Jogjakarta.
- Widjaja. 2009. *Otonomi Daerah dan daerah otonom*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

## JURNAL

eJournal Administrasi Negara, 2014, 1603 :1616 ISSN 0000 - 0000, ejournal. an. Fisip - unmul.ac.id

Isdijoso, Brahmantio, 2002. Analisis Kebijakan Fiskal pad Era Otonomi Derah: Studi Kasus pad Sektor Pendidikan di Kota Surakarta. Kajaia Ekonomi dan Keuangan Vol.6 No.1

Mohammad Affandy. 2013. Strategi dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara. eJournal ilmu pemerintahan ISSN 228-3615, eJournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Neni Nurhayati. 2015. Pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah erhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan dimoderasi pelaksanaan *Good Governance* pada Kabupaten/wilayah III Cirebon. JRKA Volume 1 no. 1 Februari 2015: 49-61. Univrsitas Kuningan.

## PERATURAN

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

– Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  
laan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

– Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 definisi retribusi daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

### **SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI**

Andi Ulfa Achsyariana. A. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi “ Kontribusi Wisata Alam Gunung Nona Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang”. Tahun 2017

Tri Setyaningsih pada Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul skripsi “ Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman)”. Tahun 2009



Muh. Tang Abdullah. Universitas Brawijaya Malang dengan judul Disertasi  
“ Inovasi Pemerintah Daerah (Studi inovasi penyelenggaraan urusan  
pendidikan di Kabupaten Gowa). Tahun 2016.

## WEBSITE

[https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_SWOT](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_SWOT)

<http://makassar.tribunnews.com/>

<http://news.rakyatku.com/>

<http://parepos.fajar.co.id/author/redaksiparepare/>

<http://www.bpkp.go.id/sulsel.bpkp>



# LAMPIRAN



## Pedoman Wawancara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang

**Nama** :

**Jabatan** :

**Tanggal wawancara** :

NO	Daftar Pertanyaan	Ya/Tidak	Penjelasan
1	Apa yang dilakukan Bapenda daam menyesuaikan atau memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelolaan pendapatan asli daerah (Badan pendapatan daerah)?		
2	Apa yang dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah ?		
3	Bagaimana cara/upaya yang dilakukan dalam mengembangkan objek pajak?		
4	Cara meningkatkan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah?		
5	Cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah Kab. Enrekang?		
6	Cara Bapenda Enrekang dalam pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya?		
7	Bagaimana sistem pembukuan Bapenda Enrekang sehingga an dalam hal pencarian gakan pajak maupun untuk mempermudah		





	penagihannya?		
8	Cara penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan ?		
9	Cara penyesuaian tarif ?		
10	Cara penyesuaian sistem tata laksana pungutan ?		
11	Cara pengawasan dan pengendalian yuridis ?		
12	Cara pengawasan dan pengendalian teknis ?		
13	Cara pengawasan dan pengendalian penata usahaan?		
14	Apakah jumlah pegawai, serta sarana penunjang lain sudah dianggap memadai?		
15	Apakah mengikutsertakan aparatnya dalam kursus keuangan daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah ?		
16	Adakah kegiatan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi? Lalu dengan cara bagaimana?		
17	Bagaimana cara menciptakan sumber-pajak dan retribusi daerah Kab. Enrekang ?		



18	Adakah kebijakan di bidang Investasi yang dilakukan oleh Bapenda Enrekang?		
19	Apakah ada sistem reward/penghargaan bagi masyarakat yang taat membayar pajak?		
20	Adakah hukuman atau sanksi bagi masyarakat yang tidak taat dalam membayarpajak dan retribusi daerah?		



**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018**

NO	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2013	Rp 2.041.000.000	Rp 3.413.931.005	167,27%
2	2014	Rp 5.417.500.000	Rp 6.071.708.609	112,08%
3	2015	Rp 7.130.000.000	Rp 7.340.370.536	102,95%
4	2016	Rp 7.373.000.000	Rp 9.147.4033.707	118,23%
5	2017	Rp 9.965.000.000	Rp 9.022.821.580	90,55%
6	2018	Rp 10.783.000.000	Rp 10.202.823.433	94,62%

*Sumber :Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2019*

**Target dan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2013-2018**

NO	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2013	Rp 11.502.343.500	Rp 9.329.297.320	81,11 %
2	2014	Rp 21.957.428.963	Rp 13.393.457.919	61,00 %
3	2015	Rp 19.802.406.960	Rp 15.557.657.681	78,56 %
4	2016	Rp 22.609.497.500	Rp 19.879.314.053	87,92 %
5	2017	Rp 30.165.130.944	Rp 21.472.509.412	71,18 %
6	2018	Rp 33.757.347.000	Rp 32.236.167.687	95,49%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang 2019*



**Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang  
Tahun 2013-2018**

NO	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2013	Rp 23.765.694.464	Rp 25.954.477.944	109,21 %
2	2014	Rp 37.641.158.766	Rp 33.945.145.644	90,18 %
3	2015	Rp 55.857.486.754	Rp 50.355.757.354	90,15 %
4	2016	Rp 63.863.375.385	Rp 54.633.224.642	85,55 %
5	2017	Rp 136.152.091.582	Rp 100.266.156.369	73,64 %
6	2018	Rp 129.615.126.867	Rp 76.455.644.071	58,99%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang 2019

**Jumlah Wajib Pajak Perorangan/Badan Berdasarkan Penerimaan di  
Bapenda Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2018**

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pajak Hotel	13	13	13
2	Pajak Restoran	129	184	177
3	Pajak Hiburan	18	4	12
4	Pajak Reklame	609	718	927
5	Pajak BPHTB	223	164	294
6	Pajak Penerangan jalan	16	7	7
7	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	519	1287	1547
8	Pajak Bumi dan bangunan	158.861	158.883	158.883
9	Pajak Sarang burung walet	-	-	-
10	Pajak Air tanah	-	-	-
11	Pajak Parkir	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>160.388</b>	<b>161.260</b>	<b>161.860</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019



## PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ENREKANG 2013-2018

NO	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pajak Hotel	15,895,500.00	10,683,500.00	15,521,500.00	16,371,000.00	17,201,500.00	16,493,500.00
2	Pajak Restoran	46,239,000.00	54,656,000.00	54,269,000.00	55,834,000.00	53,953,000.00	58,211,000.00
3	Pajak Hiburan	950,000.00	5,475,000.00	6,500,000.00	9,500,000.00	3,100,000.00	9,430,000.00
4	Pajak Reklame	82,493,750.00	107,788,425.00	136,042,180.00	131,077,550.00	177,979,100.00	233,686,780.00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	2,455,747,807.00	2,803,455,708.00	3,132,806,449.00	3,357,579,512.00	4,166,994,589.00	4,224,181,257.00
6	Pajak Mineral Bukan Logam & batuan	776,964,898.00	1,045,289,555.00	1,506,837,618.00	2,417,429,369.00	1,691,133,463.00	1,774,568,613.00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	1,983,194,625.00	2,328,940,739.00	2,616,018,576.00	2,496,212,433.00	2,750,012,742.00
8	BPHTB	35,676,050.00	61,165,796.00	159,453,050.00	543,593,700.00	416,247,495.00	1,136,293,541.00
9	Retribusi Jasa Umum	11,502,343,500.00	13,393,457,919.00	15,557,657,681.00	19,879,314,053.00	21,472,509,412.00	32,236,167,687.00
10	Retribusi Jasa Usaha						
11	Retribusi Perizinan tertentu						
	<b>JUMLAH PAD</b>	<b>25,954,477,944</b>	<b>33,945,145,644.63</b>	<b>50,355,757,354.44</b>	<b>54,633,224,642.95</b>	<b>100,266,156,369.35</b>	<b>76,455,644,071.13</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Enrekang 2019



## Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2018

No	Jenis Penerimaan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pajak Daerah	3,413,931,005.00	6,071,708,609.00	7,340,370,536.00	9,147,403,707.00	9,022,821,580.00	10,202,823,433.00
2	Retribusi Daerah	9,329,297,320.00	13,393,457,919.00	15,557,657,681.00	19,879,314,053.00	21,472,509,412.00	32,236,167,687.00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	2,770,422,551.00	2,912,293,695.00	3,387,902,299.67	4,826,158,746.00	12,355,808,162.48	13,596,908,237.00
4	Lain-Lain PAD yang sah	10,440,827,068.33	11,567,685,421.63	24,069,826,837.77	20,780,348,136.95	57,415,017,215.07	20,419,744,714.13
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>25,954,477,944</b>	<b>33,945,145,644.63</b>	<b>50,355,757,354.44</b>	<b>54,633,224,642.95</b>	<b>100,266,156,369.35</b>	<b>76,455,644,071.13</b>

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Enrekang Tahun 2019*



## JENIS PAJAK BERDASARKAN KECAMATAN DI KABUPATEN ENREKANG 2018

No	Kecamatan	Jenis Pajak							
		P. Hotel	P.Restoran	P.Hiburan	P.Reklame	BPHTB	PPJ	P. Mineral bukan logam & Batuan	PBB
1	Maiwa	-	14	12	148	3			26.572
2	Bungin	-	-	-	-	-			4.939
3	Enrekang	11	42	-	347	262			18.088
4	Cendana	-	8	-	86	-			10.046
5	Baraka	-	20	-	130	1			19.113
6	Buntu Batu	-	-	-	40	1			9.128
7	Anggeraja	1	62	-	126	12			13.836
8	Malua	-	-	-	25				6.839
9	Alla	1	31	-	330	14			12.839
10	Curio	-	-	-	30	-			16.826
11	Masalle	-	-	-	-	-			12.895
12	Baroko	-	-	-	88	-			7762
	Jumlah	13	177	12	1350	293	7	1547	<b>158.883</b>

*Sumber : Bapenda Kabupaten Enrekang tahun 2019*



## Perbandingan Pajak Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Setiap Kecamatan Di Kabupaten Enrekang

Nama Kecamatan	Pajak Bumi dan Bangunan
Maiwa	26.572
Bungin	4.939
Enrekang	18.088
Cendana	10.046
Baraka	19.113
Buntu Batu	9.128
Anggeraja	13.836
Malua	6.839
Alla	12.839
Curio	16.826
Masalle	12.895
Baroko	7762
Jumlah	<b>158.883</b>

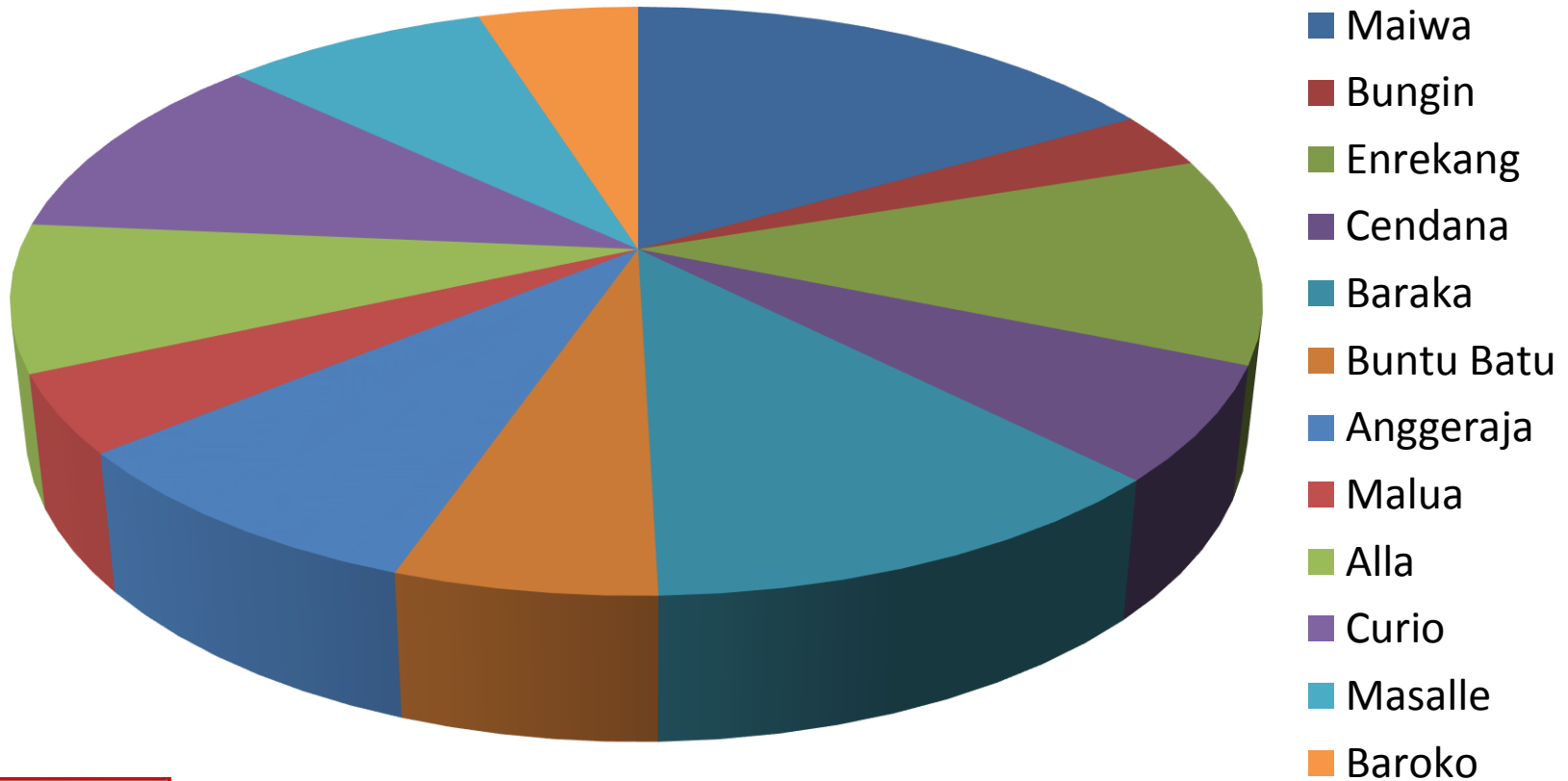
Sumber : Badan pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019





## Perbandingan Pajak Bumi Dan Bangunan Setiap Kecamatan Di Kabupaten Enrekang

### Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019



# LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

